



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)

2023

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024

Email : programdistankp@gmail.com



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena atas perkenannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini merupakan salah satu bahan informasi dan evaluasi secara lengkap yang dapat mencerminkan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada pimpinan daerah, selain itu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini juga merupakan gerbang informasi untuk mengetahui, mengenal dan memahami pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023.

Semoga, seluruh upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Selayar menjadi ladang amal ibadah bagi kita semua, serta penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar, senantiasa mendapat perlindungan, kekuatan, petunjuk, dan ridho Allah SWT. Amin.

Benteng, 19 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kabupaten
Kepulauan Selayar,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

ANDI KRISNAYANTI, S.Sos.

Pangkat : Pembina, IV/A

NIP. 196809181993032005



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1
1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD	2
1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural	5
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	
2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	8
2.2. Kebijakan Daerah	43
2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022	46
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	
3.1. Tugas Pembantuan dan Penugasan	48
3.2. Hambatan - Hambatan	66
BAB IV PENUTUP	67



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.3.1 Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2023	5
Tabel 1.3.2 Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang Tahun 2023.....	6
Tabel 1.3.3 Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Berdasarkan Struktur Jabatan Tahun 2023	7
Tabel 2.1.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan.....	29
Tabel 2.1.2 Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama	39
Tabel 2.1.3 Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan	40
Tabel 2.1.4. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja	42
Tabel 2.2. Kebijakan Daerah (Perda, Perbup dan Keputusan Bupati) yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan Ditetapkan oleh Kepala Daerah	43
Tabel 3.1 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	52
Tabel 3.2.1 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Ditjen Hortikultura yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	57



Halaman

Tabel 3.2.2	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Ditjen Hortikultura yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	47
Tabel 3.2.3	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Ditjen Perkebunan yang dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	61
Tabel 3.3	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	64



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Foto Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar	1
Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar	2



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113). Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, adalah tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan beralamat di Jl. DR. Sam Ratulangi No. 17 Benteng, Kode Pos 92812. E-mail programdistankp@gmail.com.



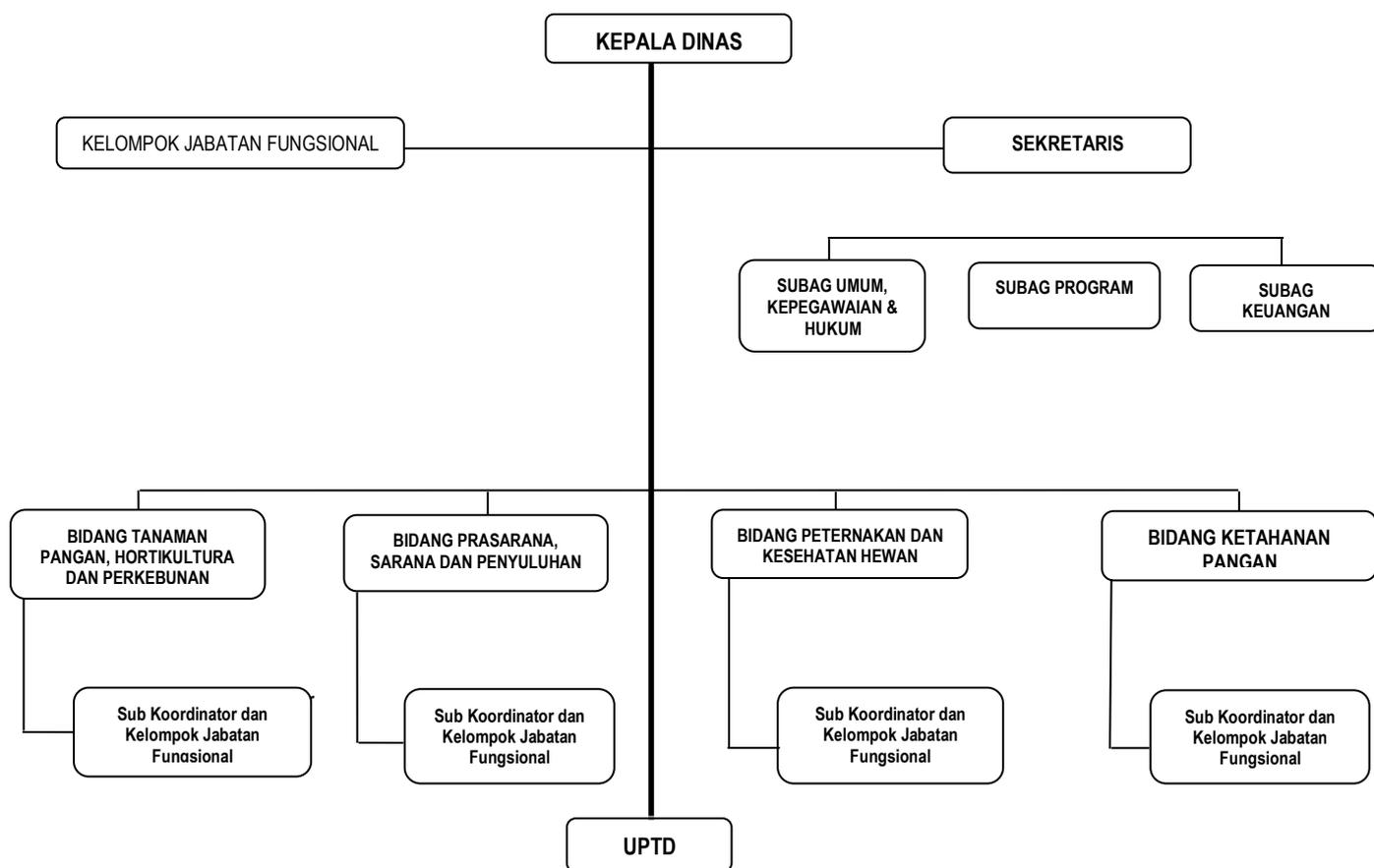
Gambar 1. Foto Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar



1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 dijabarkan melalui Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 688).

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar (Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 137 Tahun 2021)



Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar



Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian dan ketahanan pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil serta pemberian izin pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
4. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.



Tugas pokok Kepala Dinas meliputi:

1. menyusun rencana kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
7. menyelenggarakan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
8. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
9. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
10. melaksanakan administrasi Dinas;
11. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
12. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
13. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Dinas serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
15. menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural.

Dalam melaksanakan urusan pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, salah satu faktor penunjang terpenting adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Jumlah pegawai pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai kondisi terakhir 31 Desember 2023 adalah 125 pegawai.

a. Kualifikasi pendidikan

Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3.1. Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2023

No	Kualifikasi Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	SLTP	0	0	0 orang
2.	SLTA	20	8	28 orang
3.	DIPLOMA SATU (D1)	0	1	1 orang
4.	DIPLOMA TIGA (D3)	2	5	7 orang
5.	SARJANA (S1)	33	49	82 orang
6.	MAGISTER	4	3	7 orang
Jumlah				125 orang



b. Pangkat dan Golongan Ruang

Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3.2. Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang Tahun 2023

No.	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1	2	3
2.	Pembina Tk. I	IV/b	1	6	7
3.	Pembina	IV/a	9	6	15
4.	Penata Tk. I	III/d	8	13	21
5.	Penata	III/c	7	14	21
6.	Penata Muda Tk. I	III/b	9	8	17
7.	Penata Muda	III/a	5	9	14
8.	Pengatur Tk. I	II/d	4	2	6
9.	Pengatur	II/c	9	2	11
10.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	0	0	0
11.	Pengatur Muda	II/a	0	0	0
12.	PPPK	IX	0	1	1
13.	PPPK	VII	0	1	1
14.	PPPK	V	4	4	8
	Jumlah		54	62	125



c. Struktur Jabatan

Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Struktur Jabatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3.3 Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Struktur Jabatan Tahun 2023

No	Struktur Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Eselon II	0	1	1 orang
2.	Eselon III A	1	-	1 orang
3.	Eselon III B	3	1	4 orang
4.	Eselon IV A	-	5	5 orang
5.	Eselon IV B	-	1	1 orang
6.	Non Eselon	10	13	23 orang
7.	Fungsional	40	40	80 orang
8.	PPPK (Non Eselon)	5	5	10 orang
Jumlah		59	66	125 orang



BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

2.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun program dan kegiatan yang telah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Pagu anggaran Rp.55.223.500,- realisasi Rp.37.336.200,- atau 67,61%.

Pelaksanaan program ini bertujuan untuk menggali dan meningkatkan penyediaan berbagai komoditas pangan sehingga terjadi penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat. Adapun penjabaran program ini melalui kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan. Pagu anggaran Rp.16.716.000,- realisasi Rp.16.668.800,- atau 99,72%.

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan. Pagu anggaran sebesar Rp.9.442.000,- dan realisasi Rp.9.428.400,- atau 99,86%. Kegiatan ini merupakan pemantauan harga komoditi unggulan pertanian yang berfluktuasi dari tingkat produsen, pengumpul besar dan tingkat eksportir. Kegiatan ini juga diharapkan mampu mengoptimalisasi permintaan informasi harga pangan dan



meningkatkan pengolahan informasi harga pasar dan laporan statistik pangan yang lebih akurat. Adapun penyediaan informasi harga pangan sedangkan untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan bertujuan untuk memberikan gambaran ketersediaan pangan untuk konsumsi pangan disuatu daerah. Adapun hasil dari kegiatan ini yaitu tersusun 1 laporan dokumen Neraca Bahan Makanan.

- Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan dengan pagu anggaran sebesar Rp.7.274.000,- dan realisasi Rp.7.240.400,- atau 99,54%. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau dan menggambarkan perkembangan ketersediaan, kebutuhan dan harga pasar untuk 11 komoditas strategis yang dengan jenis komoditi yaitu beras, jagung, daging sapi, daging ayam, telur ayam, minyak goreng gula pasir, cabe rawit, cabe keriting, bawang merah dan bawang putih. Pemantauan ketersediaan dan harga pasar dilakukan setiap minggu dan tersusun 1 laporan ketersediaan dan harga untuk 11 komoditi strategis.
- b. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota. Pagu anggaran Rp. Rp.21.750.000,- dan realisasi Rp.4.500.000,- atau 20,69%.

Sub kegiatan :

- Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp.21.750.000,- dan realisasi Rp.4.500.000,- atau 20,69%. Kegiatan ini berupa pengadaan beras yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin melalui padat karya dan penurunan stunting di wilayah rentan rawan pangan, namun tidak terlaksana karena adanya kenaikan harga beras di Badan Urusan Logistik (Bulog) yang tidak diprediksi sebelum perubahan anggaran tahun 2023 sehingga harga satuan di DPA lebih rendah.



- c. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai Angka Kecukupan Gizi. Pagu anggaran Rp.16.757.000,- dan realisasi Rp.16.167.400,- atau 96,48%.

Sub kegiatan :

- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Local. Pagu anggaran sebesar Rp. 16.757.000,- dan realisasi Rp. 16.167.400,- atau 96,48%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai upaya pemberdayaan wanita untuk mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Tujuan dari kegiatan ini yaitu disamping untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat juga ditujukan untuk meningkatkan keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat agar lebih beragam, bergizi seimbang dan aman guna menunjang hidup sehat dan produktif. Data kelompok pemanfaatan optimalisasi pekarangan melalui kegiatan penanaman benih sayuran berupa kangkung, sawi dan terong yaitu (1) KWT Mawar Boneria Desa Barat Lambongan Kec. Bontomatene, (2) KWT Kamboja Desa Mekar Indah Kec. Buki, (3) KWT Fatmawati Desa Mare-mare Kec. Bontomanai, (4) KWT Berkah Kel. Bontobangun Kec. Bontoharu, (5) KWT Anggrek I Desa Harapan Kec. Bontosikuyu.

2. Program Penanganan Kerawanan Pangan. Pagu anggaran Rp.7.635.000,- dan realisasi Rp.7.091.400,- atau 92,88%.

- a. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan. Pagu anggaran Rp. 7.635.000,- dan realisasi Rp.7.091.400,- atau 92,88%.

Sub kegiatan :

- Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dengan pagu anggaran Rp. 7.635.000,- dan



realisasi Rp.7.091.400,- atau 92,88%. Hasil dari kegiatan ini adalah Peta komposit yang menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, desa-desa dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Dimana prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relative lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (desa) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah desa yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya pada wilayah prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan. Berdasarkan hasil analisis tersebut dari 88 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk bahwa desa rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 36 desa dari 88 desa (26,14%) yang terdiri dari 0 desa (0%) Prioritas 1; 10 desa (11,36%) Prioritas 2; dan 13 desa (14,77%) Prioritas 3. Desa prioritas 2 tersebar 1 desa di kecamatan Pasimarannu, 1 Desa di kecamatan Pasilambena, 1 desa di Kecamatan Pasimasunggu, 3 desa di Kecamatan Takabonerate, 1 desa di Kecamatan Pasimasunggu Timur, 1 desa di Kecamatan Bontosikuyu, 1 desa di Kecamatan Benteng dan 1 desa di Kecamatan Bontomatene. Desa prioritas 3 tersebar 3 desa di Kecamatan Pasimarannu, 2 desa di Kecamatan Pasilambena, 2 desa di Kecamatan Pasimasunggu, 3 desa di Kecamatan Takabonerate, dan 3 desa di Kecamatan Pasimasunggu Timur.



3. Program Pengawasan Keamanan Pangan. Pagu anggaran Rp.6.762.000,- dan realisasi Rp.222.000,- atau 3,28%.

a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah kabupaten/Kota. Pagu anggaran Rp.6.762.000,- dan realisasi Rp.222.000,- atau 3,28%.

Sub Kegiatan :

- Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten Kota. Pagu anggaran Rp.6.762.000,- dan realisasi Rp.222.000,- atau 3,28%.

Adapun tujuannya yaitu sebagai upaya terpenuhinya pangan segar yang bebas dari kontaminasi oleh bahan mikrobiologis, pestisida dan logam berat yang membahayakan kesehatan, melakukan pengujian pangan segar serta menyiapkan informasi tentang kondisi keamanan pangan segar di Kabupaten Kepulauan Selayar. Uji sampel pangan segar berupa sayuran tidak terlaksana karena pelaksana untuk uji sampel pangan segar belum tersedia pada e-katalog lokal Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk kegiatan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar juga dilakukan melalui penyampaian-penyampaian kepada petani dan kelompok tani tentang bahaya penggunaan pestisida serta pelatihan-pelatihan pembuatan pestisida nabati pada Kelompok Wanita Tani (KWT).

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pagu anggaran Rp.11.843.462.576,- dan realisasi Rp.11.679.645.351,- atau 98,62%.

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Pagu anggaran Rp.20.100.000,- dan realisasi Rp.20.100.000,- atau 100%. Sub Kegiatan :

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Pagu anggaran Rp.11.879.000,- dan realisasi Rp.11.879.000,- atau 100%. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi



perencanaan anggaran program dan kegiatan pembangunan pada lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Renstra yang kemudian dijabarkan dalam RKA/DPA SKPD. Adapun hasil dari kegiatan ini yaitu tersusunnya Perubahan Renstra 2021-2026, Renja Tahun 2024, Perubahan Renja Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Rencana Aksi Tahun 2023, Dokumen Anggaran Tahun 2023.

- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Pagu anggaran Rp.2.222.000,- dan realisasi Rp.2.222.000,- atau 100%. Kegiatan ini merupakan pengukuran kinerja untuk memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021–2026 dan Rencana Kerja Tahun 2023. Pengukuran kinerja ini digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2023.
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Pagu anggaran Rp.5.999.000,- dan realisasi Rp.5.999.000,- atau 100%. Kegiatan ini merupakan evaluasi kinerja untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian target masing-masing indikator yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023. Evaluasi kinerja ini digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersusunnya



LKPJ, LPPD, Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja atas Perjanjian Kinerja, serta Profil Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2022 1 dokumen.

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Pagu anggaran Rp.10.310.618.676,- dan realisasi Rp.10.188.167.081,- atau 98,81%. Kegiatan ini merupakan penyusunan dan pencatatan data serta informasi secara sistematis untuk menyediakan keterangan dalam hal keuangan atau adanya ketersediaan dokumen pelaporan keuangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sub kegiatan :

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Pagu anggaran Rp.10.301.820.676,- realisasi Rp.10.179.369.081,- atau 98,81%. Kegiatan ini meliputi penyediaan gaji dan tunjangan ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebanyak 114 orang.
- Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD. Pagu anggaran Rp.3.636.000,- realisasi Rp.3.636.000,- atau 100%. Kegiatan ini meliputi pelayanan jasa administrasi keuangan yaitu verifikasi SPJ, pencatatan dan pengadministrasian serta pemeriksaan keuangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Adapun hasil kegiatan ini yaitu adanya pelayanan jasa administrasi keuangan selama 12 bulan.
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD. Pagu anggaran Rp.5.162.000,- realisasi Rp.5.162.000,- atau 100%. Kegiatan ini merupakan penyusunan laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan/ anggaran pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2022. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersusunnya 1 dokumen laporan Akhir Keuangan (Neraca Keuangan)



- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Pagu anggaran Rp.4.061.400,- realisasi Rp.4.061.400,- atau 100%.

Sub kegiatan :

- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah. Pagu anggaran Rp.4.061.400,- realisasi Rp.4.061.400,- atau 100%. Kegiatan ini meliputi rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk tahun 2023. Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya 1 laporan barang milik daerah.

- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Rp.20.493.600,- realisasi Rp.19.489.600,- atau 95,10%.

Sub Kegiatan :

- Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai. Pagu anggaran Rp.10.151.600,- realisasi Rp.10.075.600,- atau 99,25%. Kegiatan ini meliputi monitoring dan evaluasi kehadiran pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta penilaian SKP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan. Pagu anggaran Rp.10.342.000,- realisasi Rp.9.414.000,- atau 91,03%. Sosialisasi yang dilaksanakan adalah sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemeliharaan dan Kesehatan Ternak, yang dilaksanakan di Desa Barat Lambongan Kecamatan Bontomatene. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pemeliharaan dan kesehatan ternak yang menjadi isi dari Peraturan Daerah tersebut.



- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Rp.389.693.900,- realisasi Rp.385.622.900,- atau 98,96%.

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Pagu anggaran Rp.30.413.900,- realisasi Rp.29.942.900,- atau 98,45%. Hasil kegiatan adalah tersedianya produk spanduk, jilid dan fotocopy selama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Pagu anggaran Rp.9.280.000,- realisasi Rp.5.800.000,- atau 62,50%. Kegiatan berupa berlangganan Koran 3 (tiga) jenis.
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Pagu anggaran Rp.350.000.000,- realisasi Rp.349.880.000,- atau 99,97%. Kegiatan berupa koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Kepulauan Selayar dalam upaya peningkatan pelayanan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebagai upaya penunjang pelaksanaan pelayanan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Pagu anggaran Rp.943.485.000,- realisasi Rp.923.574.248,- atau 97,89%.

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Pagu anggaran Rp.85.678.000,- realisasi Rp.85.678.000,- atau 100%. Hasil kegiatan berupa pengadaan alat tulis kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Pagu anggaran Rp.94.960.000,- realisasi Rp.84.105.248,- atau 88,57%. Hasil kegiatan berupa layanan internet, air dan listrik



untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Pagu anggaran Rp.762.847.000,- realisasi Rp.753.791.000,- atau 98,81%. Hasil kegiatan berupa layanan makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu, layanan jasa pengelolaan sampah, layanan jasa pegawai harian lepas serta layanan alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan komputer untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Pagu anggaran Rp.155.010.000,- realisasi Rp.138.630.122,- atau 89,43%.

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan. Pagu anggaran Rp.41.630.000,- realisasi Rp.41.543.522,- atau 99,79%. Hasil dari kegiatan ini yaitu terpeliharanya kendaraan dinas dan pembayaran pajak kendaraan dinas jabatan mobil tipe VII sebanyak 1 unit.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas/Lapangan. Pagu anggaran Rp.103.310.000,- realisasi Rp.88.550.600,- atau 85,71%. Hasil dari kegiatan ini yaitu terpeliharanya kendaraan dinas dan pembayaran pajak kendaraan dinas dengan rincian untuk motor tipe I sebanyak 54 unit, motor tipe III sebanyak 15 unit, dan mobil tipe IV sebanyak 1 unit.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Pagu anggaran Rp.10.070.000,- realisasi Rp.8.536.000,- atau 100%. Kegiatan ini meliputi pemeliharaan AC, laptop dan printer.



5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian. Pagu anggaran Rp.1.956.515.800,- realisasi Rp.1.280.829.448,- atau 65,46%.

a. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian. Pagu anggaran Rp.844.495.500,- realisasi Rp.443.050.900,- atau 52,46%.

Sub Kegiatan :

- Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi. Pagu anggaran Rp.385.214.000,- realisasi Rp.308.269.000,- atau 80,03%. Kegiatan ini mencakup pelaksanaan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) oleh 4 (empat) Kelompok Wanita Tani (KWT) yaitu : (1). KWT Kamboja Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu, (2) KWT Anggrek Desa Laiyolo Baru Kec. Bontosikuyu, (3) KWT Bunga Seroja Kel. Putabangun Kec. Bontoharu, (4) KWT Melati Kel. Batangmata Kec. Bontomatene. Kegiatan ini juga mencakup pengawasan penggunaan sarana pasca panen serta penyusunan harga pasar komoditi pertanian. Hasil dari kegiatan adalah laporan pengawasan penggunaan sarana pasca panen dan laporan harga pasar komoditi pertanian tahun 2023.

Pada kegiatan ini terdapat 1 (satu) KWT Cahaya Ujung Desa Ujung Kec. Pasimasunggu Timur yang tidak terealisasi pada pelaksanaan P2L karena pengaruh dampak *elnino* yang menyebabkan kurangnya sumber air pada wilayah tersebut.

- Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian. Pagu anggaran Rp.459.281.500,- realisasi Rp.134.781.900,- atau 29,35%. Terdapat anggaran pengadaan handtraktor sebanyak 6 unit, mesin pemotong rumput 2 unit, herbisida 176 botol, tungku pengasapan kopra 1 unit yang diluncurkan ke tahun anggaran 2024. Adapun Kegiatan ini berupa pengadaan sarana pertanian meliputi :



1. Kawat Duri

Pengadaan kawat duri sebanyak 282 roll dengan penerima manfaat yaitu :

- Poktan Pertanian Bina Mandiri Kelu. Bontobangun Kec. Bontoharu sebanyak 141 roll.
- Poktan Dara Indra Permai Desa Harapan Kec. Bontosikuyu sebanyak 141 roll.

2. Pestisida Roundup

Pengadaan pestisida Roundup sebanyak 1.234 liter dengan penerima manfaat sebagai berikut :

- Poktan Suka Maju Desa Kembang Ragi Kec. Pasimasunggu sebanyak 176 liter.
- Poktan Sejahtera Desa Bontosaile Kec. Pasimasunggu sebanyak 176 liter.
- Poktan Bontomalling Desa Bontomalling Kec. Pasimasunggu Timur sebanyak 177 liter.
- Poktan Bonto Harapan Desa Bontobaru Kec. Pasimasunggu Timur sebanyak 177 liter.
- Poktan Baji Minasa Desa Batang Kec. Takabonarate sebanyak 352 liter.

3. Bak Fiber

Pengadaan Bak Fiber sebanyak 4 buah dengan penerima manfaat Poktan A'rera Kel. Benteng Utara Kec. Benteng.

- b. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota. Pagu anggaran Rp.1.025.149.900,- realisasi Rp.779.624.948,- atau 76,05%.

Sub Kegiatan :

- Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman. Pagu anggaran Rp.239.982.000,- realisasi Rp.12.536.584,- atau 5,22%. Terdapat anggaran pengadaan benih padi Inbrida



sebanyak 1.400 Kg dan pengadaan jeruk keprok selayer sebanyak 3.333 pohon yang diluncurkan ke tahun anggaran 2024.

- Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman. Pagu anggaran Rp.785.167.900,- realisasi Rp.767.088.364,- atau 97,70%. Kegiatan berupa intensifikasi dengan pengadaan sarana produksi pertanian berupa bibit tanaman hortikultura dan perkebunan sebanyak 23.973 pohon dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengadaan Bibit Pala

Pengadaan bibit pala sebanyak 8.823 pohon dengan penerima manfaat yaitu

- Poktan Baji Pamai Desa Bontokoraang Kec. Bontomanai 2.000 pohon
- Poktan Bina Karya Desa Bontomarannu Kec. Bontomanai 2.000 pohon
- Poktan Harapan Baru Desa Bonea Timur Kec. Bontomanai 2.000 pohon
- Poktan Nirannuang III Desa Bonea Timur Kec. Bontomanai 1.775 pohon
- Poktan Bina Usaha Desa Lalang Bata Kec. Buki 823 pohon
- Poktan Usaha Baru Desa Kohala Kec. Buki 225 pohon.

2. Pengadaan Bibit Sukun

Pengadaan bibit sukun sebanyak 6.400 pohon dengan penerima manfaat yaitu

- Poktan Nekara Jaya Kel. Benteng Kec. Benteng 500 pohon
- Poktan Cemerlang Desa Kalepadang Kec. Bontoharu 300 pohon
- Poktan Tana Toa Desa Bontomarannu Kec. Bontomanai 500 pohon



- Gapoktan Anugerah Mandiri Desa Kohala Kec. Buki 800 pohon
- KWT Kamboja Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu 500 pohon
- KWT Mawar Desa Binanga Sombaiya Kec. Bontosikuyu 500 pohon
- KWT Sipainga' Kel. Benteng Utara Kec. Benteng 100 pohon
- KWT Teratai Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu 500 pohon
- KWT Juluatia Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu 500 pohon
- Poktan Subur Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu 500 pohon
- Poktan Tamalanrea Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu 700 pohon
- Poktan Tunas Baru Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu 500 pohon
- Poktan Tunas Jaya Desa Buki Kec. Buki 500 pohon.

3. Pengadaan Bibit Alpukat

Pengadaan bibit alpukat sebanyak 2.350 pohon dengan penerima manfaat yaitu

- Gapoktan Sipaingak Desa Tamalanrea Kec. Bontomatene 360 pohon
- Gapoktan Tuna Bontotangnga Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu 300 pohon
- Poktan Nirannuang III Desa Bontokoraang Kec. Bontomanai 300 pohon
- Poktan Sipakatau Desa Bontokoraang Kec. Bontomanai 300 pohon



- Poktan Sumber Makmur Desa Onto Kec. Bontomatene 440 pohon
- Poktan Tunas Baru Desa Onto Kec. Bontomatene 400 pohon
- Poktan Tunas Muda Desa Kohala Kec. Buki 200 pohon

4. Pengadaan Bibit Mangga

Pengadaan bibit mangga sebanyak 6.400 pohon dengan penerima manfaat yaitu

- Poktan A'rera Kel. Benteng Utara Kec. Benteng 600 pohon
- Poktan Pamaling Jaya Desa Lowa Kec. Bontosikuyu 1.250 pohon
- Poktan Sinar Lowa Desa Lowa Kec. Bontosikuyu 1.250 pohon
- Poktan Tunas Baru Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu 250 pohon
- KWT Teratai Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu 250 pohon
- Poktan Alam Indah Desa Bontosunggu Kec. Bontoharu 600 pohon
- Poktan Harapan jaya Desa Kahu-kahu Kec. Bontoharu 600 pohon
- Poktan Juluatia Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu 250 pohon
- KWT Kamboja Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu 250 pohon
- Poktan Lamberea II Kel. Benteng kec. Benteng 600 pohon
- Poktan Minasa Upa Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu 250 pohon
- Poktan Subur Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu 250 pohon.



- c. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain. Pagu anggaran Rp.86.870.400,- realisasi Rp.58.153.600,- atau 66,94%.

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain. Pagu anggaran Rp.86.870.400,- realisasi Rp.58.153.600,- atau 66,94%. Terdapat anggaran pengadaan ayam broiler sebanyak 310 ekor dan pengadaan pakan ayam sebanyak 1.400 Kg yang diluncurkan ke tahun anggaran 2024. Kegiatan ini berupa :

- o Pengadaan bibit ayam petelur/pullet sebanyak 440 ekor dengan penerima manfaat KWT Matahari Lingkungan Tabang Kel. Putabangun kec. Bontoharu.

6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian. Pagu anggaran Rp.1.969.037.000,- realisasi Rp.1.553.097.729,- atau 78,88%.

- a. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian. Pagu anggaran Rp.1.969.037.000,- realisasi Rp.1.553.097.729,- atau 78,88%.

Sub Kegiatan :

- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani. Pagu anggaran Rp.103.560.000,- realisasi Rp.93.626.500,- atau 90,41%. Anggaran yang tidak realisasi adalah anggaran untuk kegiatan Retensi.

- o Pembangunan jaringan irigasi Dusun Binanganipa Desa Bontosaile Kec. Pasimasunggu 1 unit.

- b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani. Pagu anggaran Rp.1.761.212.000,- realisasi Rp.1.365.914.729,- atau 77,56%. Jalan tani sebagai prasarana kawasan pertanian untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi dan hasil produk pertanian.



Dimensi lebar badan jalan usahatani minimal dapat dilalui kendaraan dan dapat saling berpapasan. Jalan usahatani sebanyak 11 ruas, terdapat 2 ruas jalan usahatani dan anggaran retensi yang diluncurkan ke tahun anggaran 2024.

- Pembangunan Jalan Tani ruas Baholle – Tompi Dusun Tajuiya Desa Bungaiya Kec. Bontomatene
- Pembangunan Jalan Tani Barae Lanjutan Desa Ujung Kec. Pasimasunggu Timur
- Pembangunan Jalan Tani Parang Kadieng Dusun Kampung Tangnga Desa Teluk Kampe Kec. Pasimasunggu
- Pembangunan Jalan Tani Dusun Bontoala Desa Harapan Kec. Bontosikuyu
- Pembangunan Jalan Usaha Tani Huluk Dusun Bontoala Desa Harapan kec. Bontosikuyu
- Pembangunan Jalan Usaha Tani Hulu Desa Harapan Kec. Bontosikuyu
- Pembangunan Jalan Tani Tabarro Desa Laiyolo Baru kec. Bontosikuyu
- Pembangunan Jalan Tani ruas Matahaka Desa Mare-mare Kec. Bontomanai
- Pembangunan Jalan Tani ruas Rajeng – Dodak Desa Polebunging Kec. Bontomanai.
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit. Pagu anggaran Rp.100.140.000,- realisasi Rp.93.556.500,- atau 93,43%. Kegiatan ini berupa rehabilitasi DAM Parit Poktan Selendang Mayang Dusun Lajongko Desa Kembang Ragi Kec. Pasimasunggu 1 unit. Anggaran yang tidak realisasi adalah anggaran untuk kegiatan Retensi yang diluncurkan ke tahun anggaran 2024.
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya. Pagu anggaran Rp.4.125.000,- realisasi Rp.



0,- atau 0%. Kegiatan berupa retensi pembagunan pos jaga yang tercatat sebagai hutang belanja pada neraca keuangan dan kembali diluncurkan ke tahun anggaran 2024.

7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Pagu anggaran Rp.304.967.500,- realisasi Rp.162.637.800,- atau 53,33%.

a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota. Pagu anggaran Rp.22.678.000,- realisasi Rp.22.619.600,- atau 99,74%.

Sub Kegiatan :

- Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis. Pagu anggaran Rp.22.678.000,- realisasi Rp.22.619.600,- atau 99,74%. Kegiatan ini berupa Pelayanan Terpadu Kesehatan Hewan dengan tujuan meningkatkan layanan pencegahan dan pengobatan penyakit hewan menular dalam pengendalian dan penggulungan penyakit hewan menular di Kabupaten Kepulauan Selayar.

b. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota. Pagu anggaran Rp.282.289.500,- realisasi Rp.140.018.200,- atau 49,60%.

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner. Pagu anggaran Rp.282.289.500,- realisasi Rp.140.018.200,- atau 49,60%. Kegiatan ini dilakukan untuk menyediakan obat-obatan ternak, vaksin, peralatan kesehatan hewan. Terdapat anggaran pengadaan obat ternak yang diluncurkan ke tahun anggaran 2024 karena dalam proses pengadaan barang dan jasa terkendala pada TKDN obat ternak tersebut yang tidak memenuhi aturan minimal TKDN 40%.



8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian. Pagu anggaran Rp.20.431.200,- realisasi Rp.19.566.000,- atau 95,77%.

a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten /Kota. Pagu anggaran Rp.20.431.200,- realisasi Rp.19.566.000,- atau 95,77%.

Sub Kegiatan :

- Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Pagu anggaran Rp.20.431.200,- realisasi Rp.19.566.000,- atau 95,77%. Pengendalian OPT ini adalah tindakan untuk mencegah kerugian pada tanaman budidaya yang diakibatkan oleh OPT baik hama, gulma, serangga pengganggu sehingga dapat menghindari kerugian ekonomi berupa kehilangan hasil panen serta penurunan kualitas/mutu produk panen. Kegiatan ini dilakukan pula sosialisasi dan implementasi penanganan hama kutu perisai (*Aspidiotus destructor*) pada tanaman kelapa di Desa Buki Timur Kec. Buki, Desa Bonea Makmur, Baturapak Desa Polebunging, Desa Bontomarannu Kec. Bontomanai, dan Kel. Batangmata Sapo Kec. Bontomatene.

9. Program Penyuluhan Pertanian. Pagu anggaran Rp.225.067.600,- realisasi Rp.200.775.800,- atau 89,21%. Tujuan penyuluhan pertanian adalah dalam rangka menghasilkan SDM pelaku pembangunan pertanian yang kompeten sehingga mampu mengembangkan usaha pertanian yang tangguh, bertani lebih baik, berusaha tani lebih menguntungkan, hidup lebih sejahtera dan lingkungan lebih sehat.

Adapun kegiatan dari program ini yaitu :

a. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian. Pagu anggaran Rp.225.067.600,- realisasi Rp.200.775.800,- atau 89,21%. Terdapat beberapa rencana kegiatan yang sedianya akan



dilaksanakan pada BPP wilayah kepulauan, namun terkendala pada kondisi lapangan sebagai dampak *el nino*.

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa. Pagu anggaran Rp.122.251.000,- realisasi Rp.104.835.000,- atau 85,75%. Kelembagaan Penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk memfasilitasi terlaksananya kegiatan penyuluhan di BPP diantaranya pelaksanaan kostratani di 10 BPP. Adapun 10 BPP yang terfasilitasi yaitu BPP Bontosikuyu, BPP Bontoharu/Benteng, BPP Bontomanai, BPP Buki, BPP Bontomatene, BPP Pasimasunggu, BPP Pasimasunggu Timur, BPP Pasimarannu, BPP Takabonerate dan BPP Pasilambena. Selain itu, dilakukan pula pelatihan tematik dan sosialisasi geospasial pada setiap BPP yang sumber dananya adalah DAK Non Fisik. Rekapitulasi data pembangunan pertanian tingkat kecamatan meliputi komoditas strategis pertanian dan kegiatan Balai Penyuluhan Pertanian.
- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa. Pagu anggaran Rp.85.865.600,- realisasi Rp.80.154.800,- atau 93,35%. Kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk memfasilitasi terlaksananya kegiatan kelembagaan



petani diantaranya pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) yang dilaksanakan Padang Provinsi Sumatera Barat.

- Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian. Pagu anggaran Rp.16.951.000,- realisasi Rp.15.786.000,- atau 93,13%. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan demplot di 5 (lima) BPP yaitu BPP Benteng/Bontoharu, BPP Bontosikuyu, BPP Bontomanai, BPP Buki dan BPP Bontomatene. Disamping itu bertujuan untuk memfasilitasi pertemuan rutin admin Simluhtan dan Konstratani.

Program dan kegiatan yang telah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.16.389.102.176,- (enam belas milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) dan realisasi sebesar Rp.14.941.201.728,- (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) atau sebesar 91,17%. Sisa anggaran sebesar Rp.1.447.900.448,- (satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah). Adapun uraian program kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah/ Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	RKPD Tahun 2023	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	36,36%	51,47%	- Keragaman mutu belum memenuhi harapan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Demikian pula dari segi keragaman dan keseimbangannya yaitu konsumsi padi-padian masih berlebih sedangkan konsumsi sayuran dan buah, umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan masih kurang.	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal sebagai pangan alternatif.
					Alokasi Anggaran Rp. 55.223.500	Realisasi Anggaran Rp. 37.336.200		
			DPA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan TA. 2023	<i>Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan</i>	80.2%	160,16%	- Cadangan pangan pemerintah daerah belum memenuhi aturan yang berlaku.	- Cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) : 30,13 ton
					<i>Alokasi Anggaran Rp. 16.716.000</i>	<i>Realisasi Anggaran Rp. 16.668.800</i>		
				1. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 laporan	1 laporan		
					Alokasi Anggaran Rp. 9.442.000	Realisasi Anggaran Rp. 9.428.400		
				2. Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan	1 dokumen	1 dokumen		
					Alokasi Anggaran Rp. 7.274.000	Realisasi Anggaran Rp. 7.240.400		
				<i>Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</i>	15%	0%		
					<i>Alokasi Anggaran Rp. 10,050,000</i>	<i>Realisasi Anggaran Rp. 10,030,000</i>		
				1. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	1180 Kg	0 Kg		
					Alokasi Anggaran Rp. 21.750.000	Realisasi Anggaran Rp. 4.500.000		
				<i>Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>	6	0.16		
					<i>Alokasi Anggaran Rp. 16.757.500</i>	<i>Realisasi Anggaran Rp. 16.167.400</i>		
				1. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 laporan	1 laporan		
					Alokasi Anggaran Rp. 16.757.500	Realisasi Anggaran Rp. 16.167.400		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah/ Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2.				Program Penanganan Kerawanan Pangan	57.50% Alokasi Anggaran Rp. 7.635.000	34,78% Realisasi Aggaran Rp. 7.091.400	Penanganan kerawanan pangan dilakukan pada 23 desa/kelurahan yang termasuk desa rawan pangan prioritas 1-3 (sangat rentan - agak rentan). Desa rentan pangan ditandai dengan beberapa indikator penyebab berdasarkan hasil analisis komposit yaitu 1. Rasio jumlah penduduk pertnega kesehatan terhadap kepadatan penduduk desa/kelurahan; 2. Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa/kelurahan; 3. Rasio luas lahan pertanian	Penanganan daerah rawan pangan lebih diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini OPD terkait. - Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMK M/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah. - Peningkatan akses air
			<i>Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</i>	<i>1 peta</i> <i>Alokasi Anggaran Rp. 7.635.000</i>	<i>1 peta</i> <i>Realisasi Aggaran Rp. 7.091.400</i>			
			1. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1 dokumen	1 dokumen			
				Alokasi Anggaran Rp. 7.635.000	Realisasi Aggaran Rp. 7.091.400			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah/ Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							terhadap jumlah penduduk desa/kelurahan; 4. Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga desa/kelurahan; 5. Jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah (desil-1) terhadap jumlah penduduk desa/kelurahan.	bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan pemanfaatan air bersih yang terlindungi dan steril - Penyediaan tenaga kesehatan/ tenaga medis setiap desa/ kelurahan secara merata serta meningkatkan fasilitas kesehatan di desa terpencil.
3.				Program Pengawasan Pangan Segar	80%	80%		
					Alokasi Anggaran Rp. 6.762.000	Realisasi Anggaran Rp. 222.000		
				<i>Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Kabupaten/ Kota</i>	<i>80%</i>	<i>80%</i>		
					<i>Alokasi Anggaran Rp. 6.762.000</i>	<i>Realisasi Anggaran Rp. 222.000</i>		
				1. Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan kabupaten/ kota	1 dokumen	0 dokumen		
					Alokasi Anggaran Rp. 6.762.000	Realisasi Anggaran Rp. 222.000		



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah/ Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
4.	Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DPA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2023	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota	70,28%	95,43%		
					85,00%	91,17%		
					Alokasi Anggaran Rp.11.843.462.576	Realisasi Aggaran Rp.11.679.645.351		
				<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100%	100%		
					<i>Alokasi Anggaran Rp. 20.100.000</i>	<i>Realisasi Aggaran Rp. 20.100.000</i>		
				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen		
					Alokasi Anggaran Rp. 11.879.000	Alokasi Anggaran Rp. 11.879.000		
				2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan		
					Alokasi Anggaran Rp. 2.222.000	Alokasi Anggaran Rp. 2.222.000		
				3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan		
					Alokasi Anggaran Rp. 5.999.000	Alokasi Anggaran Rp. 5.999.000		
				<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100%	100%		
					<i>Alokasi Anggaran Rp. 10.310.618.676</i>	<i>Realisasi Aggaran Rp. 10.188.167.081</i>		
				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	114 orang	125 orang		
					Alokasi Anggaran Rp. 10.301.820.676	Alokasi Anggaran Rp. 10.179.369.081		
				2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	1 dokumen		
					Alokasi Anggaran Rp. 3.636.000	Alokasi Anggaran Rp. 3.636.000		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah/ Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan Alokasi Anggaran Rp. 5.162.000	1 laporan Alokasi Anggaran Rp. 5.162.000		
				<i>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</i>	100% Alokasi Anggaran Rp. 4.061.400	100% Realisasi Anggaran Rp. 4.061.400		
				1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan Alokasi Anggaran Rp. 4.061.400	1 laporan Realisasi Anggaran Rp. 4.061.400		
				<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100% Alokasi Anggaran Rp. 20.493.600	100% Alokasi Anggaran Rp. 19.489.600		
				1. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen Alokasi Anggaran Rp. 10.151.600	1 dokumen Alokasi Anggaran Rp. 10.075.600		
				2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	185 orang Alokasi Anggaran Rp. 10.342.000	150 orang Alokasi Anggaran Rp. 9.414.000		
				<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100% Alokasi Anggaran Rp. 389.693.900	100% Realisasi Anggaran Rp. 385.622.900		
				1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 paket Alokasi Anggaran Rp. 30.413.900	2 paket Alokasi Anggaran Rp. 29.942.900		
				2. Penyesiaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3 dokumen Alokasi Anggaran Rp. 9.280.000	3 dokumen Alokasi Anggaran Rp. 5.800.000		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah/ Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan		
					Alokasi Anggaran Rp. 350.000.000	Alokasi Anggaran Rp. 349.880.000		
				<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	100%		
					Alokasi Anggaran Rp. 943.485.000	Realisasi Anggaran Rp. 923.574.248		
				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan		
					Alokasi Anggaran Rp. 85.678.000	Alokasi Anggaran Rp. 85.678.000		
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan	1 laporan		
					Alokasi Anggaran Rp. 94.960.000	Alokasi Anggaran Rp. 84.105.248		
				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	1 laporan		
					Alokasi Anggaran Rp. 762.847.000	Alokasi Anggaran Rp. 753.791.000		
				<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	100%		
					Alokasi Anggaran Rp. 155.010.000	Realisasi Anggaran Rp. 138.630.122		
				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan/ jabatan	1 unit	1 unit		
					Alokasi Anggaran Rp. 41.630.000	Alokasi Anggaran Rp. 41.543.522		
				2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas operasional/ lapangan	70 unit	53 unit		
					Alokasi Anggaran Rp. 103.310.000	Alokasi Anggaran Rp. 88.550.600		
				3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 unit	15 unit		
					Alokasi Anggaran Rp. 10.070.000	Alokasi Anggaran Rp. 8.536.000		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah/ Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
5.				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100%	80%		
					Alokasi Anggaran Rp.1.956.515.800	Alokasi Anggaran Rp. 1.280.829.448		
				<i>Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>	85%	80%		
					<i>Alokasi Anggaran Rp. 844.495.500</i>	<i>Realisasi Anggaran Rp. 443.050.900</i>		
				1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 laporan	1 laporan		
					Alokasi Anggaran Rp. 385.214.000	Alokasi Anggaran Rp. 308.269.000		
				2. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 laporan	1 laporan		
					Alokasi Anggaran Rp. 459.281.500	Alokasi Anggaran Rp. 134.781.900		
				<i>Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	86,07%	84,54%		
					<i>Alokasi Anggaran Rp. 1.025.149.900</i>	<i>Realisasi Anggaran Rp. 779.624.948</i>		
				1. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman	2 VUB	0 VUB		
					Alokasi Anggaran Rp. 239.982.000	Alokasi Anggaran Rp. 12.536.584		
				2. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	1 laporan	1 laporan		
					Alokasi Anggaran Rp. 785.167.900	Alokasi Anggaran Rp. 767.088.364		
				<i>Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota</i>	96,5%	97,17%		
					<i>Alokasi Anggaran Rp. 86.870.400</i>	<i>Realisasi Anggaran Rp. 58.153.600</i>		
				1. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah kabupaten/ Kota Lain	750 ekor	440 ekor		
					Alokasi Anggaran Rp. 86.870.400	Realisasi Anggaran Rp. 58.153.600		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah/ Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
6.				Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian	100%	100%		
					Alokasi Anggaran Rp. 1.969.037.000	Realisasi Anggaran Rp. 1.553.097.729		
				<i>Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian</i>	85%	84,61%		
					<i>Alokasi Anggaran Rp. 1.969.037.000</i>	<i>Realisasi Anggaran Rp. 1.553.097.729</i>		
				1. Pembanguna Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1 unit	1 unit		
					Alokasi Anggaran Rp. 103.560.000	Alokasi Anggaran Rp. 93.626.500		
				2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	11 buah	9 buah		
					Alokasi Anggaran Rp. 1.761.212.000	Alokasi Anggaran Rp. 1.365.914.729		
				3. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	1 unit	1 unit		
					Alokasi Anggaran Rp. 100.140.000	Alokasi Anggaran Rp. 93.556.500		
				4. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1 unit	1 unit		
					Alokasi Anggaran Rp. 4.125.000	Alokasi Anggaran Rp. 0		
7.				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	5,28%	30,86%		
					Alokasi Anggaran Rp. 304.967.500	Alokasi Anggaran Rp. 162.637.800		
				<i>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	5%	0,99%		
					<i>Alokasi Anggaran Rp. 22.678.000</i>	<i>Alokasi Anggaran Rp. 22.619.600</i>		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah/ Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				1. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 laporan	1 laporan		
					Alokasi Anggaran Rp. 22.678.000	Alokasi Anggaran Rp. 22.619.600		
				<i>Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	100%	100%		
					Alokasi Anggaran Rp. 282.289.500	Alokasi Anggaran Rp. 140.018.200		
				1. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 laporan	1 laporan		
					Alokasi Anggaran Rp. 282.289.500	Alokasi Anggaran Rp. 140.018.200		
8.				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	20,89%	20,75%		
					Alokasi Anggaran Rp. 20.431.200	Alokasi Anggaran Rp. 19.566.000		
				<i>Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</i>	20,89%	20,75%		
					Alokasi Anggaran Rp. 20.431.200	Alokasi Anggaran Rp. 19.566.000		
				1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1 laporan	1 laporan		
					Alokasi Anggaran Rp. 20.431.200	Alokasi Anggaran Rp. 19.566.000		
9.				Program Penyuluhan Pertanian	22,72%	17,14%		
					Alokasi Anggaran Rp. 225.067.600	Alokasi Anggaran Rp. 200.775.800		
				<i>Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>	0,5	0,1		
					Alokasi Anggaran Rp. 225.067.600	Alokasi Anggaran Rp. 200.775.800		



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah/ Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	10 unit	10 unit		
					Alokasi Anggaran Rp. 122.251.000	Alokasi Anggaran Rp. 104.835.000		
				2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	10 unit	10 unit		
					Alokasi Anggaran Rp. 85.865.600	Alokasi Anggaran Rp. 80.154.800		
				3. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	6 unit	6 unit		
					Alokasi Anggaran Rp. 16.951.000	Alokasi Anggaran Rp. 15.786.000		

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahun 2023.

Pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 sesuai Perjanjian Kinerja menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.1.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1.	Urusan Pertanian				
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
	1. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB		17,16	16,23)**	94,58
	2. Kontribusi Sektor tanaman pangan/ palawija terhadap PDRB		3,28	2,64)**	80,49
	3. Kontribusi Sektor hortikultura terhadap PDRB		1,04	0,95)**	91,35
	4. Kontribusi Sektor perkebunan terhadap PDRB		11,54	11,53)**	99,91
	5. Kontribusi Sektor peternakan terhadap PDRB		1,18	1,11)**	94,07
2.	Urusan Pangan				
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi		79,90	81,4	101,88

Sumber data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

)** = Angka 2022



2.1.3. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan

No.	Urusan/ Perangkat Daerah/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Urusan Pertanian					
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan					
	1. Cakupan Sarana pertanian	%	100	80	80	
	2. Cakupan Prasarana Pertanian	%	100	100	100	
	3. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana Penyakit Hewan Menular	%	5,28	30,86	584,47	
	4. Persentase Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	%	20,89	20,75	99,33	
	5. Persentase fasilitasi penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian	%	100	100	100	
	6. Cakupan bina kelompok petani	%	22,72	5,75	25,31	



No.	Urusan/ Perangkat Daerah/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
2.	Urusan Pangan					
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan					
	1. Persentase desa rawan pangan yang ditangani	%	62,50	60,87	97,39	
	2. Cakupan ketahanan dan diversifikasi pangan	%	36,36	51,47	141,56	
	3. Persentase penanganan kerawanan pangan	%	57,50	34,78	60,49	
	4. Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	80	80	100	

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



2.1.4. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No	Urusan Pemerintahan Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah	Targer Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)
1.	Urusan Pangan	69.620.500	44.649.600	24.970.900	64,13	3	99,86	5	80,53
2.	Urusan Pertanian	16.319.481.676	14.896.552.128	1.422.929.548	91,82	5	100	15	94,13
		16.389.102.176	14.941.201.728	1.447.900.448	91,17	8	99,93	20	87,33



2.2. Kebijakan Daerah (Perda, Perbup dan Keputusan Bupati) yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Kebijakan strategis yang ditetapkan untuk menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis dalam mendukung pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1.	Penetapan Penerima Bantuan Bibit Sukun Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/ Kota Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2023	Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 76/II/Tahun 2023	Upaya penyaluran bantuan barang kepada masyarakat/ kelompok tani/gapoktan tepat sasaran
2.	Penetapan Penerima Bantuan Bibit Mangga Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/ Kota Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2023	Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 74/II/Tahun 2023	
3.	Penetapan Penerima Bantuan Bibit Alpukat Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/ Kota Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana	Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 79/II/Tahun 2023	



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	Pertanian Tahun Anggaran 2023		
4.	Penetapan Penerima Bantuan Bibit Pala Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/ Kota Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2023	Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 80/II/Tahun 2023	
5.	Penetapan Penerima Bantuan Bak Fiber pada Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2023	Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 255.a/IV/Tahun 2023	
6.	Penetapan Penerima Bantuan Pengadaan Sarana Pertanian, Demplot, Pertanaman dan Kegiatan Pasca Panen pada Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2023	Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 82/II/Tahun 2023	
7.	Penetapan Penerima Bantuan Ayam Pullet Pada Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam Satu Daerah Kabupaten/ Kota Lain Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2023	Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 583/X/Tahun 2023	
8.	Penetapan Penerima Bantuan Pestisida Roundup pada Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana	Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 583.c/X/Tahun 2023	



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2023		
9.	Perubahan Atas Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 255.e/IV/TAHUN 2023 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Kawat Duri pada Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2023	Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 583.a/X/Tahun 2023	
10.	Perubahan Atas Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 80/IV/TAHUN 2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Bibit Pala Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/ Kota Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2023	Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 588/X/Tahun 2023	
11.	Perubahan Atas Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 76/IV/TAHUN 2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Bibit Sukun Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/ Kota Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana	Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 589/X/Tahun 2023	



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	Pertanian Tahun Anggaran 2023		
12.	Perubahan Atas Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 74/IV/TAHUN 2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Bibit Mangga Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/ Kota Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2023	Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 591/X/Tahun 2023	
13.	Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023	Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 706/XI/Tahun 2023	Menyediakan informasi ketahanan dan kerentanan pangan yang akurat dan komprehensi.
14.	Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023	Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 587/XII/Tahun 2022	Terpenuhinya kebutuhan pupuk dan penerapan pemupukan berimbang oleh petani

2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022

- a. Gencar melakukan pelatihan kepada penyuluh pertanian yang ada di setiap Desa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia penyuluh untuk meningkatkan produksi komoditi andalan serta memenuhi kebutuhan pupuk dan obat-obatan serta pembasmi hama bagi para petani.
 - Telah dilakukan pelatihan kepada penyuluh pertanian yaitu
 1. Pelatihan tematik pembuatan pupuk hayati dan pestisida nabati pada 10 (sepuluh) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)



yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan penyuluh pertanian dan kelompok tani dalam pembuatan pupuk hayati dan pestisida nabati untuk peningkatan produksi pertanian.

2. Pelatihan Geospasial pada 10 (sepuluh) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada penyuluh pertanian dalam pemanfaatan aplikasi pemetaan lahan berbasis WebGIS dan dapat mendukung kegiatan pemetaan partisipatif yang akan dilakukan di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) dengan melakukan pengumpulan dan updating data lahan khususnya pertanian secara lebih cepat, akurat dan mudah dalam bentuk spasial.

- Pengadaan pestisida jenis herbisida (Roundup) untuk membasmi gulma (tanaman pengganggu) pada tanaman budidaya.
- Pengadaan pestisida organik jenis insektisida (Natural Glio, Natural BVR) dan Rodentisida Petrokum untuk membasmi hama tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

b. Melakukan upaya pemenuhan kebutuhan alat dan mesin pertanian (Alsintan) baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui usulan-usulan yang massif dan terukur.

- Telah dilakukan pengusulan/permintaan bantuan alat dan mesin pertanian ke Pemerintah Pusat (Kementerian Pertanian) maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui *e-proposal* aplikasi BIMA Kementerian Pertanian berupa usulan alat pra panen berupa Traktor Roda 2 (TR2), cultivator, dan handsprayer. Terdapat pula usulan alat dan mesin pertanian untuk alat panen yaitu Combine Harvester Besar serta usulan alat pasca panen berupa Dryer dan bangunannya.



BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN
PENUGASAN

3.1. Tugas Pembantuan dan Penugasan Yang Dilaksanakan

3.1.1. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

1. *Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan :*

- a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 018.08.4.199133/2022, tanggal 27 Januari 2023
- b. Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja Tahun Anggaran 2023
- c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023.
- d. Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 829/1553/3/2023/DTPHBUN tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pelaksana Kegiatan, Pembantu Pelaksana Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Staf Bendahara Pengeluaran dan Staf Penyusun Pelaporan On-Line pada Dinas Kab/Kota yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023.

2. *Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan*

Tugas Pembantuan di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diterima dari Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bidang urusan pertanian :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan kegiatan :



a) *Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian*

b) *Fasilitas Pupuk dan Pestisida*

2. Program Dukungan Manajemen

a) *Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dari Ditjen Prasarana dan Sarana*

Sumber dana : APBN dengan jumlah dana : Rp. 130.118.000,-
(seratus tiga puluh juta seratus delapan belas ribu rupiah).

Tahapan pelaksanaan kegiatan :

1. Kelompok tani yang memenuhi kriteria CPCL mengusulkan permohonan bantuan pemerintah kepada Dinas Pertanian Kabupaten melalui BPP/Petugas Lapangan dengan melengkapi Identitas Ketua dan Anggota Poktan disertai NIK, alamat jelas, jenis dan luas lahan, usulan bantuan (benih, saprodi, lainnya), jenis varietas, jadwal tanam dan informasi lainnya yang dibutuhkan.
2. Dinas Pertanian Kabupaten/kota melakukan verifikasi atas usulan CPCL. Hasil verifikasi ditetapkan dalam bentuk SK CPCL oleh kepala Dinas Pertanian Kab/Kota. Proposal dan CPCL tersebut diusulkan melalui *e-proposal*.
3. Dinas Pertanian Provinsi melakukan verifikasi atas usulan SK CPCL dari Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota. Apabila disetujui Kepala Dinas Pertanian Provinsi membuat Surat Persetujuan dengan lampiran SK CPCL dari Dinas Pertanian Kabupaten. Selanjutnya PPK menetapkan surat Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh PA/KPA.
4. Penyaluran Bantuan Pemerintah ke kelompok tani diserahkan dalam Bentuk Barang.



3. *Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan*

3.1. Target Kinerja

- Target kinerja program/ kegiatan :
 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
 - a) *Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian*
 - Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian
 - Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian 6 bulan
 2. Fasilitas Pupuk dan Pestisida
 - Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Pupuk dan Pestisida*
 - e-RDKK mendukung pendataan penerima pupuk bersubsidi 1 paket
 - Layanan verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi 1 tahun
 3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dari Ditjen Prasarana dan Sarana
 - a) *Layanan Manajemen Kinerja Internal*
 - Layanan dukungan manajemen Satker 12 bulan
 - Target anggaran sebesar Rp. 130.118.000,- (seratus tiga puluh juta seratus delapan belas ribu rupiah).

3.2. Realisasi

- Capaian realisasi program/ kegiatan sebesar 100% dengan uraian sebagai berikut :
 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
 - a) *Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian*



- Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian
 - Pendampingan, pengawasan, monitoring dan pembinaan kelembagaan UPJA serta melakukan kegiatan pelaporan BAST *online* 6 bulan
- 2. Fasilitas Pupuk dan Pestisida
 - a) *Pelayanan Publik ke Masyarakat*
 - e-RDKK mendukung pendataan penerima pupuk bersubsidi 1 paket
 - Updating data e-RDKK Kabupaten Kepulauan Selayar Periode Tahun 2023
 - Pengawasan pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi pada 11 kecamatan
 - b) *Pelayanan Publik Lainnya*
 - Layanan verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi 1 tahun
 - Laporan Penebusan Pupuk Bersubsidi Periode berjalan 2023
 - Monitoring dan evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi pada 11 kecamatan
- 3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dari Ditjen Prasarana dan Sarana
 - a) *Layanan Manajemen Kinerja Internal*
 - Layanan dukungan manajemen Satker 12 bulan
 - Pengelolaan kegiatan Satker 12 bulan
 - Realisasi anggaran sebesar Rp. 129.188.000- (seratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) atau sebesar 99,29%.



3.1. Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

NO.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Prasarana dan sarana Pertanian	Peraturan Menteri Pertanian No. 14 tahun 2022 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan sarana Pertanian	Kabupaten Kepulauan Selayar	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	<u>130.118.000</u>	<u>129.188.000</u>	99,29		100	
			Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian			<u>10.000.000</u>	<u>10.000.000</u>				
			Monitoring dan evaluasi lingkup alat dan mesin pertanian			10.000.000	10.000.000				
			Fasilitas Pupuk dan Pestisida			<u>43.918.000</u>	<u>43.008.000</u>				
			Bimtek, monitoring dan evaluasi lingkup			17.700.000	16.790.000		Updating data RDKK		

			pupuk dan pestisida								
			Persiapan pelaksanaan bimbingan teknis lingkup pupuk dan pestisida			17.700.000	16.790.000				
			Penerima Pupuk Bersubsidi yang diverifikasi dan divalidasi			26.218.000	26.218.000				
			Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi			26.218.000	26.218.000				
			Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasana dan Sarana Pertanian			76.200.000	76.180.000				
			Layanan Manajemen Kinerja Internal			76.200.000	76.180.000		Terlaksananya dukungan operasional kegiatan PSP		
			Layanan umum			76.200.000	76.180.000				



3.1.2. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

I. Direktorat Jenderal Hortikultura

1. *Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan :*
 - a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-081.04.1.625875/2023 tanggal 30 November 2022;
 - b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023;
 - c. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2023;
 - d. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Nomor : I.PPK.4/SK/652/IX/2023 tentang Penerima Bantuan Sara Produksi Fasilitas Kawasan Aneka Cabai Ekstensifikasi untuk Pengendalian Inflasi dalam Rangka Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.

2. *Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan*

Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan dari Pemerintah Pusat tersebut, Kepala Daerah bertugas untuk melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan, serta koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.



Bidang urusan pertanian :

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran

Sub Kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan

- o Kawasan Aneka Cabai
 - Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi

Sumber dana : APBN dengan jumlah dana : Rp 64.419.000,-
(enam puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

Tahapan pelaksanaan kegiatan :

1. Kelompok tani yang memenuhi kriteria CPCL mengusulkan permohonan bantuan pemerintah kepada Dinas Pertanian Kabupaten melalui BPP/Petugas Lapangan dengan melengkapi Identitas Ketua dan Anggota Poktan disertai NIK, alamat jelas, jenis dan luas lahan, usulan bantuan (benih, saprodi, lainnya), jenis varietas, jadwal tanam dan informasi lainnya yang dibutuhkan.
2. Dinas Pertanian Kabupaten/kota melakukan verifikasi atas usulan CPCL. Hasil verifikasi ditetapkan dalam bentuk SK CPCL oleh kepala Dinas Pertanian Kab/Kota. Proposal dan CPCL tersebut diusulkan melalui *e-proposal*.
3. Dinas Pertanian Provinsi melakukan verifikasi atas usulan SK CPCL dari Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota. Apabila disetujui Kepala Dinas Pertanian Provinsi membuat Surat Persetujuan dengan lampiran SK CPCL dari Dinas Pertanian Kabupaten. Selanjutnya PPK menetapkan surat Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh PA/KPA.
4. Penyaluran Bantuan Pemerintah ke kelompok tani diserahkan dalam Bentuk Barang.



3. *Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan*

3.1. Target Kinerja

- Target kinerja program/ kegiatan :

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

a) *Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran*

Sub Kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan

Kawasan Aneka Cabai

- Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi 6 Ha

Target anggaran sebesar Rp 64.419.000,- (enam puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

3.2. Realisasi

- Capaian realisasi program/ kegiatan sebesar 100% dengan uraian sebagai berikut :

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

a) *Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran*

Sub Kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan

Kawasan Jeruk

- Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi 6 Ha Kelompok Tani Pamaling Jaya Desa Lowa Kec. Bontosikuyu
 - Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Benih Cabai 10 kg/Ha
 - Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi NPK padat 250 Kg/Ha
 - Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Ajir Modern 500/Ha

Realisasi anggaran sebesar Rp 64.419.000,- (enam puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).



Tabel 3.2. Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Ditjen Hortikultura yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

NO.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Hortikultura	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Kabupaten Kepulauan Selayar	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	64.419.000	64.419.000	100	Peningkatan Produksi cabai seluas 6 Ha	100	
			Peningkatan Produksi Sayuran			64.419.000	64.419.000				
			Kawasan Aneka Cabai			64.419.000	64.419.000				
			Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi			64.419.000	64.419.000				



II. Direktorat Jenderal Perkebunan

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan :

- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Dana Tugas Pembantuan (TP) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-081.05.4.199127/2023 tanggal 30 November 2022;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023;
- c. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Kementerian Pertanian Ditjen Perkebunan Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023;

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan dari Pemerintah Pusat tersebut, Kepala Daerah bertugas untuk melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan, serta koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

- o Intensifikasi Tanaman Pala



Sumber dana : APBN dengan jumlah dana : Rp 42.320.000,-
(empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Tahapan pelaksanaan kegiatan :

1. Kelompok tani yang memenuhi kriteria CPCL mengusulkan permohonan bantuan pemerintah kepada Dinas Pertanian Kabupaten melalui BPP/Petugas Lapangan dengan melengkapi Identitas Ketua dan Anggota Poktan disertai NIK, alamat jelas, jenis dan luas lahan, usulan bantuan (benih, saprodi, lainnya), jenis varietas, jadwal tanam dan informasi lainnya yang dibutuhkan.
2. Dinas Pertanian Kabupaten/kota melakukan verifikasi atas usulan CPCL. Hasil verifikasi ditetapkan dalam bentuk SK CPCL oleh kepala Dinas Pertanian Kab/Kota. Proposal dan CPCL tersebut diusulkan melalui *e-proposal*.
3. Dinas Pertanian Provinsi melakukan verifikasi atas usulan SK CPCL dari Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota. Apabila disetujui Kepala Dinas Pertanian Provinsi membuat Surat Persetujuan dengan lampiran SK CPCL dari Dinas Pertanian Kabupaten. Selanjutnya PPK menetapkan surat Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh PA/KPA.
4. Penyaluran Bantuan Pemerintah ke kelompok tani diserahkan dalam Bentuk Barang.

3. *Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan*

3.1. Target Kinerja

- Target kinerja program/ kegiatan :

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Intensifikasi Tanaman Pala

- Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi 100 Ha
- Pengawasan dan Pendampingan Intensifikasi Tanaman Pala 1 paket



Target anggaran sebesar Rp 42.320.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

3.2. Realisasi

- Capaian realisasi program/ kegiatan sebesar 100% dengan uraian sebagai berikut :

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Intensifikasi Tanaman Pala

- Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi 100 Ha
 1. Kelompok Tani Nirannuang I Desa Bonea Timur 15 Ha
 2. Kelompok Tani Nirannuang II Desa Bonea Timur 17,25 Ha
 3. Kelompok Tani Nirannuang III Desa Bonea Timur 12,5 Ha
 4. Kelompok Tani Bissorang Desa Bonea Timur 15,5 Ha
 5. Kelompok Tani Liput Salju Desa Bonea Makmur 10,5 Ha
 6. Kelompok Tani Nurul Takwa Desa Bontomarannu 8 Ha
 7. Kelompok Tani Tana Toa Desa Bontomarannu 5 Ha
 8. Kelompok Tani Dara Indra Permai Desa Harapan 11,25 Ha
 9. Kelompok Tani Matahari I Desa Harapan 5 Ha
- Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Pupuk Organik Padat 6.000 Kg
- Pengawasan dan Pendampingan Intensifikasi Tanaman Pala 1 paket

Realisasi anggaran sebesar Rp 42.320.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).



Tabel 3.2.3. Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Ditjen Perkebunan yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

NO.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Perkebunan	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Kabupaten Kepulauan Selayar	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	42.320.000	42.320.000	100	Peningkatan Produksi pala 100 Ha	100	
			Intensifikasi Tanaman Pala			42.320.000	42.320.000				
			Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi			27.720.000	27.720.000				
			Pengawasan dan pendampingan intensifikasi tanaman pala			14.600.000	14.600.000				



3.1.3. Bidang Ketahanan Pangan

1. *Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi:*

Dasar Hukum : DIPA Nomor : SP DIPA-081.11.1.452332/2022,
Revisi ke 02, tanggal 24 Mei 2022.

2. *Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi*

Tugas Pembantuan di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diterima dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan. Bidang Urusan Ketahanan Pangan, Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatan :

1. Pemantapan Ketersediaan dan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan.

Sumber dana : APBN dengan jumlah dana : Rp. 49.849.000,-
(empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Kegiatan :

1. Pemantapan Ketersediaan dan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan melalui Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah
2. Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan
3. Penguatan Cadangan Pangan Nasional
4. Pengendalian Kerawanan Pangan dan

Capaian Kinerja Pelaksanaan

- Pemantapan ketersediaan dan stabilitas pasokan dan harga pangan yaitu tersusunnya prognosa neraca pangan wilayah.
- Pemantapan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan yaitu tersusunnya peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan level desa/kelurahan (buku FSVA) Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Data dan informasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi



- Realisasi anggaran 98,90% sebesar Rp. 49.299.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).



Tabel 3.3. Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

NO.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Ketahanan Pangan	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Kabupaten Kepulauan Selayar	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	49.849.000	49.299.000	98,90	Terwujudnya ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas	100	
		Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi.	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			16.769.000	16.249.000	96,90			
			Rekomendasi kebijakan ketersediaan pangan			8.074.000	8.074.000		Prognosa Neraca Pangan		
			Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan			4.915.000	4.515.000				
			Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan			3.780.000	3.660.000				
			Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi			33.080.000	33.050.000	99,91	Tersusunnya peta ketahanan dan kerentanan pangan level desa dan kelurahan (buku FSVA) Kab. Kepulauan Selayar		

			Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan			23.500.000	23.470.000				
			Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi			9.580.000	9.580.000				

3.2. Hambatan - Hambatan

Sebagian besar Tugas Pembantuan diberikan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Keegiatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringkali ditemui kesulitan dalam pelaksanaannya di lapangan. Terbitnya aturan terkait penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, berdampak dilakukannya rasionalisasi anggaran pada Kementerian dan Lembaga. Implementasinya di daerah diantaranya melalui rasionalisasi dana Tugas Pembantuan baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

Revisi DIPA dilakukan beberapa kali ditengah perjalanan untuk menyesuaikan dengan pagu baru, sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan dilapangan. Dana yang dialokasikan dari beberapa kementerian ada yang menurun atau bahkan tidak ada dari tahun sebelumnya sehingga banyak target/sasaran yang belum bisa tercapai.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar secara umum dapat menggambarkan keadaan organisasi, pelaksanaan urusan pembangunan, alokasi anggaran yang diterima serta realisasi pencapaian kinerja tahun 2023. Dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan didukung APBD Kabupaten Kepulauan Selayar, Dana Tugas Pembantuan Provinsi dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan upaya pencapaian Visi Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pencapaian kinerja demikian senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus diakomodir dalam Perencanaan serta Program Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka mewujudkan visi dan misi, serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
3. Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, tentunya capaian kinerja ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen seluruh aparat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta pihak terkait lainnya, namun demikian capaian kinerja tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan.



4. Terlepas dari berbagai kesulitan dan hambatan yang ada, dengan cara pengukuran kinerja ini, maka pada tahun 2023 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat melaksanakan sasaran strategis dengan total 3 (tiga) program urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (pangan); 5 (lima) program urusan pemerintahan pilihan (pertanian); dan 1 (satu) program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
5. Dengan kerjasama dan pemahaman serta komitmen yang dibangun masing-masing pihak terkait berbagai hambatan/kesulitan dapat diatasi dengan memperhatikan skala prioritas.
6. Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini kami sampaikan sebagai laporan dan bahan evaluasi kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun 2023. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, saran dan masukan sangat diharapkan guna perbaikan lebih lanjut. Terima kasih.

Benteng, 19 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kabupaten
Kepulauan Selayar,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar

dokumen ini ditandatangani secara digital

ANDI KRISNAYANTI, S.Sos.

Pangkat : Pembina, IV/A

NIP. 196809181993032005

